



Media: Kedaulatan Rakyat

Hari: Sabtu

Tanggal: 08 Februari 2020

Halaman: 9

PEMUTAKHIRAN DATA WAJIB PAJAK PBB Pendataan Dilanjutkan ke Pakualaman dan Gondomanan

YOGYA (KR) - Pendataan wajib pajak bumi dan bangunan (PBB) di Kota Yogya akan kembali dilanjutkan. Tahun ini terdapat dua kecamatan yang menjadi sasaran yakni Pakualaman dan Gondomanan. Pendataan itu bagian dari pemutakhiran data wajib pajak PBB di Kota Yogya.

Pertama kali pemutakhiran dilakukan pada tahun 2015 lalu dengan melibatkan pihak ketiga. Akan tetapi saat itu baru menyasar empat kecamatan yakni Jetis, Gondokusuman, Tegalrejo, dan Danurejan.

"Tahun 2018 sempat dilanjutkan kembali yakni di Kecamatan Ngampilan,

kemudian tahun 2019 lalu di Kecamatan Wirobrajan. Tahun ini kami coba di dua kecamatan," jelas Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kota-Yogya Wasesa, Jumat (7/2).

Dalam proses pemutakhiran tersebut, petugas BPKAD Kota Yogya dibantu

oleh surveyor yang berasal dari warga setempat. Pelibatan warga yang menetap di wilayah setempat karena dinilai lebih mengetahui kondisi tanah dan bangunan secara faktual. Selain itu pendekatan sosial juga akan lebih mudah. Apalagi data yang sudah dimutakhirkan justru akan memberikan kepastian bagi wajib pajak dalam membayar kewajiban mereka.

Wasesa mengaku, pemutakhiran data wajib pajak PBB tersebut diperlukan karena dimungkinkan terjadi perubahan terhadap wajib pajak beserta objek pajak yang dimiliki. Pihak-

nya juga sudah melakukan sosialisasi dan meminta setiap kelurahan di kecamatan sasaran untuk menyiapkan warga yang bisa menjadi surveyor. "Keterlibatan warga sangat membantu proses pemutakhiran karena warga tersebut pasti mengetahui kondisi di wilayah dan bisa melakukan pendekatan sosial dengan lebih baik," imbuhnya.

Pemutakhiran tersebut di antaranya meliputi identitas diri wajib pajak, alamat, serta kondisi aset bumi dan bangunan yang dimiliki. Hasil pemutakhiran data tersebut akan digunakan sebagai dasar pe-

nyusunan ketetapan pajak bumi dan bangunan pada 2021. Begitu pula hasil pendataan di Kecamatan Wirobrajan pada tahun 2019 lalu yang tercatat ada 5.389 wajib pajak. Nilai ketetapan wajib pajak untuk pembayaran PBB pada tahun ini juga sudah mengacu pada hasil pemutakhiran data.

Sementara pada tahun anggaran 2020, BPKAD Kota Yogya menerbitkan 95.273 lembar surat pemberitahuan pajak terutang (SPPT). Target pendapatan dari pajak bumi dan bangunan mencapai Rp 90 miliar. (Dhi)-o

Instansi	Nilai Berita	Sifat	Tindak Lanjut
1. BPKAD	Netral	Biasa	Untuk Diketahui

Yogyakarta, 24 Juli 2026
Kepala

Ig. Trihastono, S.Sos. MM
NIP. 19690723 199603 1 005